



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Pulau Jawa

Nova Nabila¹, Okta Leviyani², Ahmad Syahril Azis³, Muhammad Kurniawan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: novanabilaa26@gmail.com¹, oktaleviani13@gmail.com²,

ahmadsyahrilazis5@gmail.com³ muhammadkurniawan@radenintan.ac.id⁴

Abstract This research aims to analyze the influence of Regional Original Income (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and General Allocation Funds (DAU) on the allocation of capital expenditure budgets on the island of Java. Capital expenditure is an important component in regional budgets that contributes directly to infrastructure development and improving public services. This study uses panel data from districts/cities on Java Island during the 2015-2020 period. The analytical method used is panel data regression with a fixed effects model (FEM) approach to identify the influence of independent variables on the dependent variable. The research results show that PAD has a positive and significant influence on capital expenditure. This indicates that regions with higher PAD tend to allocate more budget for capital expenditure. Meanwhile, DAK also has a positive and significant effect on capital expenditure, which shows that funds specifically allocated by the central government have succeeded in increasing investment in fixed assets in the regions. On the other hand, DAU was found to have a negative but insignificant effect on capital expenditure, indicating that general funds received from the central government did not directly encourage an increase in capital expenditure. This research provides important implications for regional policy makers in increasing PAD and utilizing transfer funds from the central government more effectively to accelerate the development of infrastructure and public services. Apart from that, the results of this research can also be a reference for further research in the field of regional finance and public budget management.

Keywords: Regional Original Income (PAD), Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure, Java Island

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Pulau Jawa. Belanja modal merupakan komponen penting dalam anggaran daerah yang berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Studi ini menggunakan data panel dari kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2015-2020. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *fixed effects model* (FEM) untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan PAD yang lebih tinggi cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal. Sementara itu, DAK juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan khusus oleh pemerintah pusat berhasil meningkatkan investasi dalam aset tetap di daerah. Di sisi lain, DAU ditemukan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa dana umum yang diterima dari pemerintah pusat tidak secara langsung mendorong peningkatan belanja modal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan daerah dalam meningkatkan PAD dan memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat secara lebih efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang keuangan daerah dan pengelolaan anggaran publik.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pulau Jawa

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Negara Republik Indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau sektor kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya sektor privat seperti pasar modal tetapi juga pada sektor publik (pemerintah) seperti

Pemerintah Daerah. Dampak yang terjadi lebih bersifat dampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun ada pula yang berdampak positif seperti meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi yang berakibat meningkatnya pendapatan para penghasil komoditi tersebut.

Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pula pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadilabil pula. Dengan kata lain faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (kab/kota).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada hakekatnya adalah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan keadaan riil masyarakat sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencerminan dari kebijakan tersebut terungkap dari komposisi komponen APBD.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah.

Gambar 1 Dana Alokasi Umum (DAU)

TAHUN	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat	Jakarta	Yogyakarta
2015	57 973	66 039 190 000	18.904.024	0	39 084 040,00
2016	5 263 717	5 516 240 624 514	7.747.404.320	2 883	643,207,673
2017	6 566 890	7 056 095 687 317	2879143808	2 122	967,000,859
2018	6 511 740	6 850 189 475 034,00	9 379 906 815,72	2 646	910,032,138
2019	7 195 955	7 551 054 471 797,64	304568036	2 796	978,540,310
2020	7 333 699	7 637 793 113 743,26	3098653086	3 230	102,389,124,792
2021	7 334 320	8 228 979 718 482,00	11,325,013,744	0	112,903,083,275

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Gambar 2 Dana Alokasi Umum (DAK)

TAHUN	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat	Jakarta	Yogyakarta
2015	57 973	66 039 190 000	18.904.024	0	39 084 040,00
2016	5 263 717	5 516 240 624 514	7.747.404.320	2 883	643,207,673
2017	6 566 890	7 056 095 687 317	0,00	2 122	967,000,859
2018	6 511 740	6 850 189 475 034,00	9 379 906 815,72	2 646	910,032,138
2019	7 195 955	7 551 054 471 797,64	9579035671	2 796	978,540,310
2020	7 333 699	7 637 793 113 743,26	9853790125	3 230	102,389,124,792
2021	7 334 320	8 228 979 718 482,00	11,325,013,744	0	112,903,083,275

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini.

Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk dilakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Gambar 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TAHUN	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat	Jakarta	Yogyakarta
2015	10,904,881	12 497 148 704 551	16.263.235.947	33 686	1 453 213 231,00
2016	11,541,029	12 772 227 117 585	16.180.205.532	36 888	1,673,749,196
2017	12,547,512	14 350 601 626 319	17 102 520 315,84	43 901	1,851,973,397
2018	13,711,837	18 531 062 021 823,40	19 642 915 448,76	43 327	2,040,723,347
2019	14,112,159	19 327 125 485 405,93	20 723 517 489	45 707	2,082,767,034
2020	13,669,303	17 950 996 508 801,03	22 590 845 632	57 561	115,139,328,866
2021	14,697,721	18 935 883 965 350,90	25,066,632,129	0	131,801,226,162

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya Pemerintah Daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Alokasi sumberdaya dalam mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi melalui berbagai teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam publik *expenditure management*.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Kesenambungan pemerintah daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir dari penelitian yang dilakukan

Priyo Hari Adi dan David Harianto (2007) dan menyesuaikan untuk kondisi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah baik kabupaten Semarang, Demak maupun kota Semarang sendiri yang bertujuan untuk mengetahui alokasi dan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas pelayanan publik.

Penelitian ini berusaha mengetahui adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Darwanto dan Yulia Yustikasari 2007, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari obyek yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten/Kota Se- Jawa Bali sedangkan penelitian ini dilakukan di pulau Jawa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Syukiry Abdullah dan Abdul Halim (2003) menggunakan sampel 90 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali. Alasan pemilihan sampel di lima propinsi ini adalah relatif memiliki karakteristik ekonomis dan geografis yang sama, ketersediaan data dan dipandang sudah mewakili populasi pemda dipulau Jawa dan Bali, yang secara teoritis dan empiris memiliki perbedaan dengan pemda diluar Jawa-Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan tanpa lag pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) melakukan penelitian dengan sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 2004- 2005 dengan alasan ketersediaan data. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah sampling atau sampel bertujuan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) dengan populasi dan sampel

adalah daerah kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah daerah kabupaten dan kota ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda di luar Jawa-Bali. Tahun data yang digunakan dalam penelitian adalah dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Data penelitian diperoleh penelitian ini menggunakan alat analisis Diskripsi dan analisis jalur hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yang menyatakan bahwa Belanja Pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita. Penelitian ini mendukung pernyataan BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Mutiara Maimunah (2006) menggunakan populasi daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera dengan data PAD, DAU, Belanja Daerah (belanja bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum) dan total Belanja. Data tersebut adalah data dari kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian adalah dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkecimpung dengan masalah anggaran dalam hal ini adalah APBD.

Penelitian oleh Priyo Hari Adi (2006), sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive* atau sampel bertujuan hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah

Penelitian Syukriy Abdullah (2004) menghasilkan bahwa DPRD membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan baru. Pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif dengan demikian tidak didasarkan pada prioritas anggaran.

Metode dokumentasi merupakan data yang digunakan melalui studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku atau bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut:

- **Belanja modal**

Adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

- **PAD (Pendapatan Asli Daerah)**

Adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.

- **DAK (Dana Alokasi Khusus)**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- **DAU (Dana Alokasi Umum)**

Adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang dipaparkan, maka hasil pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan hasil uji statistik meliputi uji hipotesis F dan uji hipotesis t, yang diperoleh, dibahas dan dianalisis implikasinya bagi pengalokasian anggaran belanja modal di Pulau Jawa dengan menggunakan data selama periode 2015-2021 disajikan sebagai berikut.

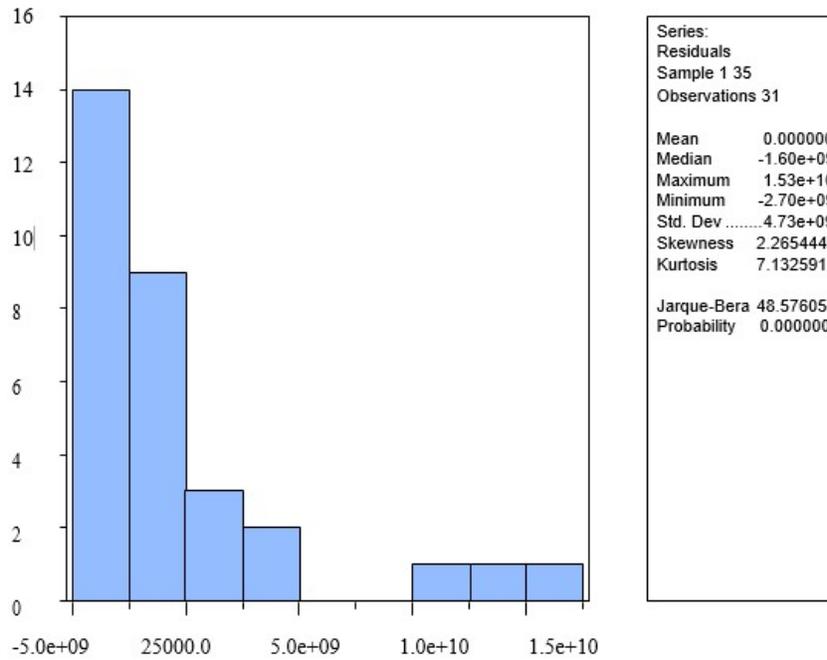
1. Hasil Uji Asumsi Klasik

- a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada program Econometric views (Eviews) menggunakan cara uji Jarque-Bera. Jarque-Bera yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengukur skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila data bersifat

normal (Winarno, 2015). Uji yang digunakan adalah uji Jarque Bera. Kriteria penilaian statistik JB yakni: Probabilitas $JB > \alpha = 5\%$, maka residual terdistribusi normal. Probabilitas $JB < \alpha = 5\%$, maka residual tidak terdistribusi normal.

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas



(Sumber: Lampiran 2)

Dari gambar 4, didapatkan nilai dari Jarque-Bera adalah sebesar 0,162398 dengan probabilitas sebesar 0,000000. Berdasarkan kriteria penilaian statistik JB, dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < \alpha = 5\%$ yakni 0,05, maka dapat dikatakan residual terdistribusi tidak normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel bebas. Uji keberadaan multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF) dari variabel-variabel penjelas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil pengukuran nilai VIF

Variance Inflation Factors

Date: 04/24/24 Time: 15:48

Sample: 1 35

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
PAD	0.188022	6.557523	3.357405
DAU	0.113318	2.092914	1.783058
DAK	1.087387	7.621386	4.668925
C	8.32E+18	1.988908	NA

Variabel	Nilai VIF
PAD	3,35
DAU	1,78
DAK	4,66

Berdasarkan tabel 1 dapat melihat hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF), diketahui bahwa perhitungan nilai VIF seluruh variabel bebas berada dibawah 10 atau lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya masalah multikolinearitas pada model regresi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatanyang lain (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi keberadaan heterokedasitas dapat dilakukan dengan cara uji Harvey. Penilaian sutu model regresi memiliki masalah heteroskedastisitas dapat diketahui dari uji White Heteroskedasticity. Uji White Heteroskedasticity mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual. Jika nilai chi-squares hitung ($n \cdot R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukantidak adanya heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White		
F-statistic	2.097893 Prob. F(3,26)	0.1249
Obs*R-squared	5.846667 Prob. Chi-Square(3)	0.1193
Scaled explained SS	6.580942 Prob. Chi-Square(3)	0.0865

Berdasarkan tabel 2, nilai chi square hitung (n.R2) sebesar 5.846667 diperoleh dari informasi Obs*R-squared yaitu jumlah observasi yang dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai chi squares tabel (χ^2) pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 3 adalah 2.097893. Karena nilai chi square hitung (n.R2) sebesar 5.846667 > chi-square tabel (χ^2) sebesar 2.097893, maka tidak ditemukan gejala Heteroskedastisitas pada model regresi linear berganda.

d. Hasil Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi yaitu hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2015). Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 3. hasil pengujian autokolerasi dari model regresi berganda

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:		
F-statistic	51.14794 Prob. F(1,25)	0.0000
Obs*R-squared	20.15075 Prob. Chi-Square(1)	0.0000

Berdasarkan hasil uji autokolerasi pada tabel 4, didapatkan informasi besaran nilai chi-squares hitung adalah sebesar 20.15075, sedangkan nilai Chi Squares kritis pada derajat kepercayaan $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 2 memiliki nilai sebesar 5,99148. Dari hasil tersebut, maka dengan nilai Chi Square hitung sebesar 20.15075 < dari nilai Chi Square kritis sebesar 5,99148, maka hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi masalah autokolerasi pada model.

2. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini ada tiga tahap yaitu, uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F) dan uji determinasi (R2) sebagai berikut:

Hasil Uji t (Keberartian Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.¹⁸

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan uji T (Ghozali, 2018). Pada uji t (t-test) kali ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada tahun 2015-2021.

1) Taraf nyata

Dengan menggunakan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), dengan $df (n - k) = (7 - 4) = 3$, maka diperoleh t-tabel sebesar 2,35336.

2) Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika $t_{hitung} < 2,35336$. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > 2,35336$.

3) Rumusan Hipotesis Statistik

$H_0 : \beta_1 < 2,35336$, artinya PAD berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2015 – 2021.

$H_a : \beta_1 > 2,35336$, artinya PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2015 – 2021.

$H_0 : \beta_2 < 2,35336$, artinya variabel DAU berpengaruh Positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2015 – 20221

$H_a : \beta_2 > 2,35336$, artinya variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2015 – 2021.

$H_0 : \beta_2 < 2,35336$, artinya variabel DAK berpengaruh Positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2015 – 2021

$H_a : \beta_2 > 2,35336$, artinya variabel DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2015 – 2021.

a) Pengujian nilai PAD secara parsial terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) adalah:

Tabel 5. Hasil Uji t PAD

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
PAD	0.806203	1.859260	2,35336	0.068867	Tolak H_0

Sumber: Eviews 10

Berdasarkan table 5 diatas, dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 1,859260, lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,35336. Maka menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti bahwa variabel PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap engalokasian Nggaran Belanja Modal di Pulau Jawa.

b) Pengujian nilai DAU secara parsial terhadap Pengalokasian Anggran Belanja Modal (BM) adalah:

Table 6. Hasil Uji DAU

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
DAU	-0.186208	-0.553157	2,35336	0.068867	Tolak Ho

Sumber: Lampiran 2.

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar - 0,553157 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,35336. Maka meonolak Ho dan menerima Ha, yang berarti bahwa variabel DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa.

- c) Pengujian nilai DAK secara parsial terhadap Pengalokasian Anggran Belanja Modal (BM) adalah:

Table 7. Hasil Uji DAK

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
DAU	-0.344705	-0.330564	2,35336	0.068867	Tolak Ho

Sumber: Lampiran 2.

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar - 0,330564 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 2,35336. Maka meonolak Ho dan menerima Ha, yang berarti bahwa variabel DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa.

Hasil uji F (Keberartian Keseluruhan)

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan atau secara bersama-sama, yaitu untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM).

- a) Taraf Nyata

Dengan tarif nyata (α) = 5 % atau tingkat keyakinan 95% dengan derajat kebebasan $df = (k-1 (df1)) (n-k-1 (df2)) = (4- 1) (7-4-1) = (3) (2)$, diperoleh nilai F tabel sebesar 19,164 untuk seluruh model persamaan.

- b) Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika F hitung $\leq 19,164$ H_0 ditolak jika F hitung $> 19,164$

- c) Rumusan Hipotesis Statistik

$H_0: \beta_1, \beta_2 < 19,164$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa.

Ha : $\beta_1, \beta_2 > 19,164$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa.

Tabel 8. Hasil uji F

Variabel	f-statistik	f-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
PAD,DAU,DAK	2,6637	19,164	0.068867	Terima Ho

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa f-hitung sebesar 2,6637 lebih besar daripada f-tabel sebesar 19,164. Maka menolak Ho dan menerima Ha, yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Dependent

Dependent Variable: BM

Method: Least Squares

Date: 04/24/24 Time: 15:46

Sample: 1 35

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.806203	0.433615	1.859260	0.0743
DAU	-0.186208	0.336627	-0.553157	0.5849
DAK	-0.344705	1.042779	-0.330564	0.7436
C	2.68E+09	2.88E+09	0.928842	0.3615
R-squared	0.235097	Mean dependent var		7.69E+09
Adjusted R-squared	0.146839	S.D. dependent var		1.21E+10
S.E. of regression	1.12E+10	Akaike info criterion		49.24002
Sum squared resid	3.26E+21	Schwarz criterion		49.42684
Log likelihood	-734.6003	Hannan-Quinn criter.		49.29979
F-statistic	2.663746	Durbin-Watson stat		0.415509
Prob(F-statistic)	0.068867			

Sumber : Lampiran 2

Nilai R² terletak pada $0 < R^2 < 1$, suatu nilai R² mendekati 1 yang artinya modelnya semakin baik. Sedangkan nilai R² yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. Dari table 8, Dengan letak R² = 1 dengan nilai $0 = 0,23 = 1$, hal ini berarti bahwa varians dari Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja

mampu menjelaskan varians dari Pertumbuhan Ekonomi sebesar 23%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa. Sedangkan secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa tahun 2015 – 2021. Jadi, persamaan analisis regresi linier dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{BM} = & 2,68 + 0,8062 \text{ PAD} + -0,1862 \text{ DAU} + -0,3447 \text{ DAK} \\ & (2,88) \quad (0,4336) \quad (0,3366) \quad (0,1467) \\ & [0,9288] \quad [1,8592] \quad [-0,5541] \quad [-0,3305] \\ & \text{R-squared : } 0,23 \end{aligned}$$

F-statistik : 2,66 Ket : () : Std. Error Ket : [] : t-statistik

Persamaan analisis regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 2.68. Makna dari koefisien konstanta tersebut adalah apabila PAD, DAU dan DAK nilainya adalah 0 maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,68%.

Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel PAD menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,806. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa menunjukkan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel PAD sebesar 1,8592 lebih kecil dari pada nilai t tabel sebesar 19,164 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan PAD sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar 0,806 persen dengan asumsi ceteris paribus.

Pengaruh DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel DAU menunjukkan tanda negatif, yakni sebesar -0,186. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa menunjukkan

angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel DAU sebesar -0,5531 lebih kecil dari pada nilai t tabel sebesar 19,164 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan DAU sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada peningkatan nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar -0,186 persen dengan asumsi ceteris paribus.

Pengaruh DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel DAK menunjukkan tanda negatif, yakni sebesar -0,344. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa menunjukkan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel DAK sebesar -0,3305 lebih kecil dari pada nilai t tabel sebesar 19,164 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan DAK sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada peningkatan nilai Pengalokasian alokasi Belanja Modal (BM) sebesar -0,344 persen dengan asumsi ceteris paribus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa tahun 2015 – 2021.
- 2) DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa tahun 2015 – 2021.
- 3) DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) di Pulau Jawa tahun 2015 – 2021.
- 4) PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif tidak signifikan dan negatif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau dengan alpha (α) = 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2004, October 4-5). Perilaku oportunistik legislatif dan penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory. Paper presented at Seminar Antar Bangsa, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1-26.
- Suparmoko, S. (2002). Keuangan dan pembangunan daerah. In *Ekonomi Publik* (pp. XX-XX). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tarigan, M. R. P. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halim, A. (2001). Analisis deskripsi pengaruh fiskal stress pada APBD pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. *KOMPAK. STIE YO*, 127-146.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2003). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah studi kasus kabupaten/kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1-26.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2005). *Teori ekonomi makro: Suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Yustikasari, Y., & Darwanto. (2007). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-25.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.